TENURIAL MASYARAKAT PINGGIR HUTAN

Oleh:

Hafidz

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember
hafidz_stainjember@gmail.com

ABSTRACT

The wave of resistance will continue to color Indonesia history since Indonesian has never resolved problem of fundamental life, justice, welfare and prosperity. Talking about awareness and people's value is as result of social injustice process for a long time. Therefore, any form of movement and action conducted by people to forest authorities should be understood by social injustice context. Authorizing area massively conducted by Kramat Sukoharjo society is a resistance to power of state which is in crisis. The study applied qualitative approach which is best to review meaning or understanding of complex human experience. This approach focused on effort of managing philosophical and theoretical meaning and reaching objective meaning of value in object of the study. Qualitative approach was applied to find meaning or understanding of mindset of forest land manager community in Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Jember

Keywords: *Tenurial, Forest Society*

PENDAHULUAN

Gelombang perlawanan merupakan persoalan alami, sebagai akibat proses dominasi atau proses ketidak-adilan yang dialami sekelompok masyarakat karena didominasi oleh kelompok masyarakat lain atau dominasinya pemegang kekuasaan terhadap rakyatnya. Bahkan budaya perlawanan menjadi *mitologi* bagi masyarakat Jawa. Beberapa tahun lalu ketika Indonesia berada dalam keterpurukan kondisi krisis multi dimensional pasca jatuhnya rezim Soeharto, banyak pihak mendambakan munculnya sang *Ratu Adil*, yang sangat diharapkan untuk menyelesaikan berbagai krisis yang me-

Hafidz

nimpa masyarakat.¹ Sartono mengatakan munculnya wacana *Ratu Adil* dalam masyarakat Indonesia merupakan respons terhadap kondisi sosial politik, sosial ekonomi yang kacau. Fenomena ini terwujud dalam berbagai gerakan-gerakan juru selamat (*mesianisme*), gerakan ratu adil (*millenerianisme*), gerakan pribumi (*nativism*), gerakan kenabian (*prophetisme*) dan gerakan penghidupan kembali (*revitalism*). Pada masa kolonial-impresisme misalnya, kehadiran Pangeran Diponegoro dianggap sebagai sang Ratu Adil. Demikian juga hadirnya SI (Sarekat Islam) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) telah mengusung ideologi Ratu Adil untuk mendapat simpati para pendukung dan pengikutnya.

Pada era orde baru, gelombang perlawanan ditunjukkan dengan jatuhnya kekuasaan orde baru, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Implikasi jatuhnya kekuasaan orde baru melahirkan gerakan lain pada masyarakat di lapisan paling bawah, yaitu masyarakat pinggir hutan di seluruh wilayah di Indoensia, termasuk yang ada di wilayah Tapal Kuda. Sepanjang lereng pegunungan Argopuro yang membentang mulai dari Probolinggo hingga Banyuwangi kondisi hutan yang awal mula berupa hutan lindung yang berada dalam naungan perhutani direbut oleh masyarakat, yang kemudian dijadikan lahan pertanian berupa tanaman Kopi, Pisang dan tanaman jenis lain.

Pemahaman tentang “imbal jasa lingkungan”, mekanisme *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), dan ekspektasi pasar karbon membawa pemahaman baru tentang hak atas tanah dan sumberdaya alam. Isu pokok dalam perdebatan REDD adalah: 1) siapa yang memiliki, atau dapat mengklaim, hak untuk mengeluarkan emisi, menjual karbon, atau menawarkan investasi untuk upaya-upaya penurunan emisi; dan 2) siapa yang memiliki, atau dapat mengklaim, hak untuk menerima imbalan penurunan emisi. Perdebatan REDD ini menuntut kepastian tenurial. Sayangnya, bentuk instrumen tenurial yang diakui secara hukum (sebagai jawaban atas kepastian tenurial) belum mampu menjawab beragamnya bentuk pengelolaan dan penguasaan tanah masyarakat lokal/adat.

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 36/2009 dijabarkan be-

¹ Kartodirdjo, Sartono, *Protest Movement in Rural Java; a Studiest of Agrarition Unrest in The Nineteenth and Eraly Twentieth*. (Singapura: Sinturis Kartodirjo, 1973) :59

berapa instrumen tenurial berupa pemegang ijin/hak pengelolaan di dalam kawasan hutan untuk masyarakat, seperti hutan desa, HKm (hutan kemasyarakatan), dan sebagainya. Selanjutnya, pemegang ijin/hak pengelolaan hutan tersebut dapat mengajukan IUP RAP-KARBON (ijin usaha pemanfaatan penyerapan karbon) dan/atau IUP PAN-KARBON (ijin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon untuk dapat menerima imbalan penurunan emisi. Namun, kesesuaian bentuk-bentuk pengakuan tenurial melalui hak pengelolaan hutan dengan bentuk pengelolaan dan penguasaan masyarakat yang ada di lapangan perlu dipertanyakan.

Model-model hak pengelolaan hutan untuk masyarakat yang ditawarkan oleh negara dapat mengancam keberadaan bentuk pengelolaan dan penguasaan masyarakat lokal/adat. Selain itu model-model hak pengelolaan hutan tersebut dapat menjadi ranjau bagi pengembangan skema REDD dan pasar karbon.

Bentuk penguasaan tanah dan hutan masyarakat yang bersifat komunal belum terakomodasi dalam peraturan nasional, sehingga dirasakan adanya kebutuhan kejelasan untuk bentuk penguasaan seperti ini. Pengembangan hak atas hutan sebagai jawaban yang ditawarkan oleh pemerintah memerlukan pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah jawaban ini sesuai dengan ekspektasi dan keberadaan pengelolaan dan penguasaan masyarakat

Kondisi ini juga berlaku di luar kawasan hutan Realitas seperti ini adalah cermin atas realias ketidakadilan sosial di negeri ini. Memang negeri ini telah lama merdeka, tetapi kondisi buruk tidak pernah berubah di kantong-kantong kemiskinan, terutama wilayah pedesaan yang tidak memiliki akses dengan kekuasaan. Seperti Desa Kramat Sukoharjo, sebuah Desa yang ada di sebelah Barat Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Tanggul. Masyarakat Kramat Sukoharjo baru bisa menikmati listrik 10 tahun yang lalu, itupun hingga saat ini belum merata dinikmati oleh masyarakat. Listrik yang dinikmati saat ini merupakan hasil swakelola mandiri masyarakat dengan ditarik biaya Rp. 2.500.000,- per kepala keluarga.²

Tidak hanya listrik, fasilitas lain juga belum bisa dinikmati, seperti infrastruktur jalan aspal baru dibangun sepanjang 5 km, dari sejumlah jalan yang mencapai 50 km lebih. Padahal kalau dicermati lebih dalam kondisi pem-

² Diambil dari Profil Desa Kramat Sukoharjo 2015

Hafidz

bangunan infra struktur yang buruk tidak sebanding dengan kekayaan alam yang ada di Kramat Sukoharjo. Masalahnya sederhana kekayaan alam yang melimpah tidak bisa dinikmati warga Kramat Sukoharjo, karena alasan cukup klasik bahwa sebagian besar kekayaan alam Kramat Sukoharjo adalah lahan PTPN XII Zelandia dengan tanaman Karet dan Kopi seluas lebih dari 5000 Ha dan PTP swasta Hasfarm Suko Kulon yang ditanami komoditi yang sama seluas lebih dari 1500 Ha.

Di tengah kekayaan yang berlimpah dengan dikelilingi lahan Perkebunan, nyaris kehidupan masyarakat Sukoharjo sebagian bergantung kepada perkebunan sebagai Buruh Perkebunan, dengan mayoritas sebagai buruh tidak tetap dengan standart UMR Rp. 25.500,- per hari. Pekerjaan ini dilakukan karena lahan pertanian yang dimiliki oleh mereka sendiri bukanlah lahan yang relatif subur, karena disamping berada di lereng pegunungan yang tidak dilalui oleh sisa vulkanik gunung aktif, sifat lahan kebanyakan bersifat tadah hujan. Sedangkan sebagian lain bergantung sebagai buruh tani pada pemilik sawah yang rata-rata para pemilik sawah memiliki lahan tidak lebih dari 0,5 sampai 1 Ha.

Kondisi ekonomi yang buruk memaksa hampir sebagian besar warga Kramat sukoharjo pernah bekerja sebagai TKI ke luar negeri, dan ikut program transmigrasi ke Kalimantan dan Sumatra, dan bahkan ada yang menetap kira-kira 1/3 dari warga kramat Sukoharjo menetap di Tenggaraong, KM 15 Kalimantan Timur. Sisanya yang sebagian kecil bekerja sebagai pedagang.

Secara geografis Desa Kramat Sukoharjo adalah daerah pegunungan dengan sistem persawahan yang terbatas, tetapi memiliki banyak lahan tadah hujan sehingga cocok untuk tanaman keras atau lahan perkebunan. Saat ini rata-rata lahan penduduk ditanami pohon rambutan, yang selama 5 tahun terakhir ini gagal panen karena cuaca buruk, sedangkan sisanya ditanami tanaman kayu keras, seperti Sengon Laut, Mahoni dan Jati Mas.

Desa Kramat Sukoharjo, di sebelah utara berbatasan dengan lahan PTPN XII Zelandia, kemudian Perhutani, di sebelah Barat berbatasan dengan PTP swasta HasFarm suko Kulon kemudian Kecamatan Semboro, di sebelah Timur berbatasan dengan lahan PTPN XII Zelandia, kemudian Desa Manggisian dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Patemon.

Desa Kramat Sukoharjo memiliki luas wilayah 1.915 Ha, selain wilayah perkebunan. Desa Kramat Sukoharjo memiliki tiga dusun, yaitu dusun Suko Barat, Suko Timur dan Zelandia, terdiri dari 42 RT dan 6 RW dengan jumlah 1775 Kepala keluarga, 6.309 jiwa, dengan jumlah penduduk Miskin 992 Kepala keluarga, jumlah pengangguran 582 jiwa.³

Dari data geografis di atas, sedikit tergambar kondisi kemiskinan yang dialami warga ini. Kondisi lahan yang tidak subur, yang hanya lahan perkebunan, baru bisa menikmati panen setahun sekali, maka wajah suram ekonomi menjadi sangat jelas. Hanya saja mereka adalah petani yang tangguh dan hebat, tidak pernah mengenal lelah. Untuk mensiasati hidup, ketika tidak ada masa panen, sedangkan di perkebunan tidak ada pekerjaan, mereka harus bekerja sebagai buruh bangunan di Bali, atau bekerja becak di Malang dan Jember dan sebagai tambahan sampingan mereka memelihara kambing atau sapi yang diserahkan kepada istri dan anaknya untuk dirawat.

Sunai atau Pak Hasanah⁴ misalnya, seorang warga di Dusun Suko Barat desa Kramat Sukoharjo, usia 60 tahun, mantan ketua RT. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia harus bekerja sebagai tukang becak di Malang. Becak di Malang baginya adalah pilihan pahit yang harus diterima, karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa diharapkan di kampungnya. Setiap bulan sekali, ia baru pulang ke rumah untuk menyetor uang ke keluarganya sebagai hasil becak.⁵

Kondisi ekonomi yang buruk memperparah kondisi yang lain, seperti banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Rata-rata anak di Desa ini, setelah menamatkan dari SD, mereka sudah enggan sekali untuk melanjutkan ke SLTP dengan alasan tidak ada dana, alasan membantu kebutuhan ekonomi keluarga, dll. Fenomena sosial lain yang sangat memperhatikan adalah banyak anak perempuan melakukan kawin muda. Biasanya setelah lulus SD, anak-anak perempuan yang tidak sekolah atau mondok di Pesantren dan bekerja, mereka banyak yang memutuskan untuk kawin muda.

³ Diambil dari Profil Desa Kramat Sukoharjo 2015

⁴ Wawancara 5 Januari 2015 di rumah Sunai alias P. Hasanah

⁵ wawancara 13 oktober 2015 di rumah p.sudarto selaku sekretaris LMDH suko makmur

Hafidz

Realitas kehidupan buruk seperti ini, menurut P.Sudarto⁶, memaksa sebagian warga masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Perkebunan dan lahan Perhutani melakukan penebangan hutan secara liar yang kemudian dijadikan lahan pertanian, serdadaknya terdapat sekitar 2500 Ha lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dengan dikelola sebanyak 800 orang dengan rata-rata mereka memiliki lahan sekitar 1 hingga 10 Ha per orang.

PEMBAHASAN

Tenurial Masyarakat Pinggir Hutan

Hutan Sebagai Lahan Produktif Dan Sebagai Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat.

Sejak dahulu, bahkan semenjak di Sekolah Dasar, doktrin bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam jamak terdengar. Doktrin tersebut memang merupakan fakta. Dari sektor hutan sendiri saja, Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang begitu besar sehingga dikenal sebagai *mega-biodiversity country*

Hutan merupakan penyangga bumi dari kehancuran. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kalau air dikatakan sumber kehidupan, hutannya dapat dikatakan penyangganya. Akar-akar kayu yang ada di hutan berfungsi disamping menyerap juga menyimpan air. Atau singkatnya, hutan merupakan mesin sirkulasi air paling canggih yang tak dapat digantikan dengan apapun. Hutan merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai komponen yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu: berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan.⁷

⁶ wawancara 13 oktober 2015 di rumah p.sudarto selaku sekretaris LMDH suko makmur

⁷ Simon. *Membangun kembali hutan Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004)

Sejak awal penanaman bibit kopi dan tanaman tegakan tinggi seperti durian, manggis, dan petai diorientasikan sebagai tanaman penahan erosi dan longsor. Tujuannya agar hutan tetap hijau dan lestari serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai penopang pendapatan masyarakat daerah hutan. Kehidupan masyarakat daerah hutan mulai menggeliat dan bangkit, taraf ekonomi mereka mulai cerah. Para petani hutan begitu semangat menggarap lahan yang mereka kuasai demi hasil panen yang diharapkan, penambahan lokasi hutan untuk ditanami bibit kopi dan lain semakin luas. Berbeda yang pada awalnya hanya puluhan hektar saja yang ditanami kopi dan tanaman lainnya, kini sudah sekitar 2000 Ha lebih sudah tertanam kopi dan tanaman lainnya sehingga hutan beralih fungsi sebagai hutan kopi produktif.

Hutan kopi yang digarap oleh sebagian besar masyarakat Kramat Sukoharjo adalah jenis kopi Arabica yang mempunyai musim panen satu kali (1x) dalam setahun. Sedang tanaman lainnya merupakan tanaman tegakan tinggi seperti; petai, manggis, alpukat dan sebagian kecil pohon mahoni, tujuannya agar tanah tidak mudah longsor dan tergerus air hujan.

Hutan yang ditanami kopi dan tanaman lainnya, secara geografis berada di utara desa Kramat sukoharjo, yang bersebelahan dengan Perkebunan karet PTPN XII Zeelandia, sebelah barat berbatasan dengan PT Hasfarm suko kulon kec. Semboro, sebelah timur berbatasan dengan desa Manggis dan sebelah utara hutan merupakan Kabupaten Probolinggo. Hutan tersebut merupakan hutan milik dinas kehutan yang bekerjasama dengan perhutani untuk mengawasi dan merawat hutan tersebut, akan tetapi kenyataannya hutan tetrkesan hanya di awasi tanpa ada perawatan berarti dari pihak terkait, karena setiap saat petugas perhutani datang mengecek kondisi hutan dan sesekali bertamu ke tokoh masyarakat untuk turut menjaga kelestarian hutan tanpa ada sosialisasi kepada warga untuk berpartisipasi merawat hutan. Sehingga pada awalnya masyarakat yang terdesak secara ekonomi menjarah kayu hutan untuk dijual demi kebutuhan ekonomi masyarakat. Sehingga pihak terkait tidak bisa mengendalikan hal tersebut dan terkesan dibiarkan sampai hutan nyaris gundul tidak ada kayu-kayu besar yang mampu menjadi penahan bencana dikala musim hujan datang.

Keresahan itu datang dari masyarakat itu sendiri karena melihat kon-

Hafidz

disi hutan sudah mengkhawatirkan. Akhirnya sebagian masyarakat berinisiatif memanfaatkan hutan sebagai penopang ekonomi dan penghijauan kembali serta mengembalikan hutan sebagai cagar alam agar tetap lestari.

Saat peneliti datang tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh cukup besar didaerah pinggir hutan yaitu; bapak Sumarto. Bapak Sumarto adalah pionir pertama yang menggagas lahan hutan menjadi hutan produktif. Secara panjang lebar Bapak Sumarto menceritakan kronologis peristiwa pertama pembukaan lahan sebagai berikut:⁸

“...Penguasaan hutan terjadi sekitar tahun 1998 bulan September, berawal dari perkenalan pak sumarto dengan salah satu orang perhutani yang sudah pensiun, dari pembicaraan tentang penguasaan hutang yang ada daerah Gondang Desa Manggis yang lebih dulu dikuasai masyarakat. Dari informasi yang diperoleh bahwa hutan yang belantara yang tidak tersentuh dan terawat boleh dibabat dan ditanami pohon yang produktif seperti kopi, cengkeh, dan buah-buahan yang lain seperti durian dan manggis. Yang kemudian pak sumarto mempunyai inisiatif untuk membabat hutan didaerahnya untuk dijadikan sebagai lahan hutan produktif yang bisa menghasilkan dan menopang perekonomian masyarakat. Pada akhirnya pak sumarto mengumpulkan tokoh masyarakat diantaranya adalah : Pak Sutami, Pak Yasin, Pak Rohima, Pak Suparman Untuk bermusyawarah tentang penguasaan lahan hutan belantara menjadi lahan hutan yang produktif. Kemudian dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa tokoh-tokoh tersebut untuk mengajak warganya untuk bersama-sama membabat hutan tersebut dan membersihkannya dari semak belukar”.

Dari nara sumber yang berbeda Bapak Hadi Effendi menuturkan sebagai berikut tentang hal ihwal permulaan pembukaan lahan di hutan⁹

“...Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1999 pada era gusdur. Pada awalnya masyarakat disekitar hutan adalah masyarakat yang sering menjarah kayu-kayu besar untuk kebutuhan buat perabotan rumah dan untuk dijual lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat melakukannya tanpa ada kesadaran kelestarian hutan, mereka hanya memikirkan kebutuhan perutnya tanpa memikirkan dampak akhirnya.

⁸ Wawancara 19 Februari 2015 di rumah Sumarto

⁹ Wawancara 19 Februari 2015 di rumah Effendi

Lambat laun tahun demi tahun masyarakat mulai resah karena kayu semakin sedikit mata pencaharian mereka sudah hampir punah, sehingga sebagian masyarakat mulai memutar otak untuk memanfaatkan hutan yang sudah rusak menjadi lahan yang bisa produktif. Beberapa tokoh masyarakat menemui pihak perhutani yang dikomandani p.sumarto untuk mencari sebuah solusi pelestarian hutan dan mengembalikan hutan sebagai mestinya. Singkat kata pihak perhutani memberikan pernyataan bahwa pihak perhutani tidak memerintahkan pembukaan lahan dan tidak mau mencegahnya, asal masyarakat sadar bahwa hutan harus dilestarikan demi anak cucu kita kelak, fungsi hutan harus sesuai sebagai sumber mata air, dan paru-paru dunia, dengan pernyataan seperti itu p.sumarto dan teman-temannya melihat peluang yang sangat besar mengingat desa darungan dusun sumber bulus telah terlebih dulu melakukannya. Sehingga p. sumarto mengajak beberapa orang yang ingin merubah nasibnya untuk membuka hutan dengan membersihkan semak belukar dengan menanam bibit kopi, pada awalnya sebagian masyarakat meragukan hal yang dilakukan p.sumarto dan teman-teman karena takut terjadi polemic dan lain sebagainya. Akan tetapi akhirnya masyarakat banyak yang ikut karena tidak terbukti keraguan mereka. Dengan banyaknya masyarakat yang ikut terlibat dalam penguasaan lahan sehingga mengancam batas wilayah kepemilikan perkebunan PTPN XII ZEELANDIA, yang akan menimbulkan perselisihan antara masyarakat pemilik hutan dengan pihak Perkebunan Zeelandia. Demi keberlangsungan kehidupan masyarakat agar tercipta ketenangan anatar pemilik hutan dan perkebunan sehingga pihak perkebunan Zeelandia mendatangkan Ahli tutorial batas wilayah dari Malang untuk memastikan batas milik perkebunan PTPN XII dengan wilayah kerja Perhutani, sehingga terdapat kesepakatan anatar kedua belah pihak tentang masalah batas-batas tersebut, dan terjadi kesepakatan untuk tidak merusak dan saling menjaga kelestarian lingkungan demi terciptanya lingkungan hijau yang produktif.

Dalam proses perjalanannya penguasaan lahan hutan semakin hari semakin bertambah seiring dari hasil kopi yang telah dirasakan oleh para petani yang telah terlebih dahulu merasakan panen kopi. Semakin membludaknya masyarakat yang mempunyai keinginan menguasai lahan dihutan, semakin sulit pula cara mengendalikannya sehingga pak sumarto mem-

Hafidz

punyai inisiatif untuk membentuk wadah atau tempat perkumpulan masyarakat pemilik lahan hutan yaitu dengan membentuk LMDH Suko Makmur yang bertujuan mengkoordinir masyarakat yang memiliki lahan di hutan dan mendata jumlah pemilik lahan di hutan serta memberikan penyuluhan kepada pemilik lahan di hutan agar ditanami tanaman yang cocok untuk tanaman di lereng pegunungan argopuro.

Pak sumarto menuturkan kepada peneliti bahwa jumlah pemilik lahan di hutan sebagai berikut;¹⁰

“...Sekitar 500 an pemilik lahan yang masuk dalam kelompok LMDH SUKO MAKMUR, ada data lengkap beserta pengurusnya. Fakta yang kami dapat dari nara sumber data pemilik lahan 108 karena kurang tertibnya administrasi dalam kelompok ini”.

Senada dengan pertemuan peneliti di rumah pak Sabar Utomo tentang jumlah pemilik lahan di hutan beliau menceritakan lebih terperinci sebagai berikut;¹¹

“...Secara keseluruhan luas lahan yang dimiliki masyarakat di daerah hutan belum terdata dengan baik. Karena sebagian masyarakat yang memiliki lahan di hutan sulit untuk dilakukan pendataan karena mereka beralasan hutan yang dikelola hanya hak guna pakai yang pada akhirnya mereka sadar mereka hanya pengelola penerima hasil bukan hak sepenuhnya. Akan tetapi apabila dikroscek di beberapa kelompok yang sudah terbentuk ada sekitar 600-700 orang pemilik lahan di hutan, angka ini bisa bertambah karena pemilik hutan tidak hanya masyarakat yang berasal dari daerah hutan, sebagian ada yang berasal dari kecamatan lain seperti umbulsari, semboro, dan sumberbaru”.

Kedadaan masyarakat yang pada saat itu kesulitan ekonomi membuat mereka memutar otak untuk mencari penghasilan lebih, dimana pada saat itu adalah masa awal reformasi dan krisis ekonomi yang melanda bangsa ini. Sebagian yang sudah gerah dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit mereka ikut transmigrasi dan merantau serta hijra ke negeri lain untuk menyambung hidup mereka dan keluarga mereka. Sebagian warga masih ber-

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sumarto 2015

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sabar Utomo 2015

lahan dengan kondisi ekonomi mereka, karena memang sulit untuk jauh dengan keluarga dan alasan yang lain.

Ketika peneliti bertanya kepada P. Sudarto tentang hal yang melatar belakangi mereka menguasai lahan, beliau menuturkan sebagai berikut;¹²

“...Yang paling utama yang menjadi faktor keberanian masyarakat untuk menguasai lahan di hutan adalah faktor ekonomi, dan ini sudah diakui atau tidak masyarakat sangat terbantu dengan adanya lahan kopi di hutan. Kemudian faktor pembedukungnya adalah pernyataan presiden gusdur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang dekat dengan hutan untuk membuka lahan hutan tak produktif menjadi lahan produktif, yang mana fungsi hutan tetap tidak berubah sebagai paru-paru dunia dan untuk serapan air serta sebagai penahan erosi dan longsor”.

Kini hutan yang dulu gundul dan penuh dengan semak belukar menjadi hutan hijau penuh tanaman kopi, karena semakin banyaknya pemilik lahan di hutan yang berminat menanam kopi. Apa yang disampaikan warga kepada peneliti ketika peneliti datang ke rumah warga yang bernama pak Mattali, beliau menuturkan tentang seberapa banyak luas lahan hutan yang dimiliki tiap petani sebagai berikut;¹³

“...Tergantung dari usaha masing masing petani, lok usahanya terus meningkat maka luasnya semakin banyak, ini bukan pembagian jatah tapi usaha masing petani. Hutan yang di utara masih luas jika masyarakat masih punya keinginan membukanya maka akan bertambah luas kepemilikan lahanya, tapi masyarakat kurang berkenan memabat lahan lagi, sudah cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. masyarakat tinggal merawatnya dengan baik. Sebagian besar masyarakat memiliki lahan rata-rata 1 hektar, ada yang lebih dari itu bahkan ada yang punya hampir 10 hektar”.

Kepemilikan lahan hutan oleh warga kini mencapai ribuan hektar sesuai penuturan bapak Hadi Effendi alias Pak Septiono sebagai berikut;¹⁴

“...Jumlah warga yang memiliki lahan di hutan sesuai data yang ada di

¹² Wawancara dengan Bapak Sudarto 2015

¹³ Wawancara dengan Bapak Mattali 2015

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Septiono 2015

Hafidz

LMDH suku makmur sekitar 700 anggota sedangkan masih banyak masyarakat lain yang terdaftar di organisasi lain yang tidak bisa disebut jumlah, sehingga luas hutan yang di kuasai diperkirakan sekitar 2000 hektar lebih karena rata-rata masyarakat mempunyai lahan dihutan 1 hektar, ada juga yang lebih sampai 2 hektar juga ada yang kurang dari 1 hektar bahkan ada yang memiliki lahan lebih dari 9 hektar, akan tetapi masyarakat rata-rata punya lahan 1 hektar sampai 2 hektar”.

Dengan begitu hutan menjadi terawat karena mereka sudah merasakan secara ekonomi manfaat hutan. Hutan menjadi lahan hijau sesuai fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hal ini terungkap dalam SKB 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Badan Pertanahan Nasional) "Tentang Tatacara Penyelesaian Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan" Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor :17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014

Dengan berlandaskan SKB 4 Menteri ini, para pemilik lahan dihutan sudah mempunyai payung hukum yang melindungi mereka dalam hal pen-dayagunaan tanah terlantar. SKB ini memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan yang terlantar untuk dijadikan lahan produktif. Masyarakat pada umumnya masih takut untuk membuka lahan di hutan karena takut ada sengketa dengan pihak terkait, karena mereka tidak tahu landasan hukum yang melindungi masyarakat sekitar hutan. Bagi mereka yang sudah memiliki lahan dihutan dan tergabung dalam LMDH yang dibentuk oleh masyarakat, seakan mereka sudah mendapat angin segar atas penguasaan lahan dihutan. Secara umum masyarakat sekitar hutan belum mengetahui tentang peraturan ini sehingga masih ada keraguan untuk menguasai lahan dihutan.

Hutan Sebagai Lahan Basah Perekonomian Masyarakat

Sedikit sekali masyarakat yang sadar dan mengetahui bahwa hutan adalah lahan sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat, karena dianggapnya hutan adalah lahan yang berada didataran tinggi yang sulit terjangkau air, sehingga anggapan sebagian masyarakat hanya tanaman tertentu saja yang mampu hidup didataran tinggi dan irupun tidak ber-

pengaruh besar pada perekonomian. Persepsi tersebut berbeda terbalik dengan fakta yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kramat sukoharjo yang hidup didaerah lereng hutan Pegunungan Argopuro.

Masyarakat Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan segelintir masyarakat mampu menikmati hasil dari pemanfaatan lahan di hutan. Dari perambahan hutan belantaran menjadi hutan produktif, merupakan hasil usaha yang luar biasa sehingga hutan tetap lestari serta berdaya fungsi lebih sekedar hutan biasa, akan tetapi mampu menopang kehidupan masyarakat secara luas khususnya daerah hutan lereng barat Pegunungan Argopuro.

Masyarakat yang pada awalnya apatis kini berubah menjadi masyarakat yang optimis, perekonomian begitu menggeliat setelah mereka merasakan manisnya panen kopi hasil jerih payah perambahan hutan menjadi hutan yang dipenuhi tanaman kopi ribuan hektar. Kelangsungan pendidikan anak sampai perguruan tinggi pun tercapai. Kesejahteraan masyarakat begitu terasa diseluk beluk Desa Kramat Sukoharjo sekitar hutan. Desa lambat laun menjadi desa mandiri dan produksi, oleh karena produksi kopi yang melimpah dalam tiap panennya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nuraji salah satu pengurus LMDH Kramat Jaya yang mengatakan dalam petikan wawancara bahwa semakin banyak lahan yang dikelola maka seseorang akan semakin banyak penghasilan yang diperoleh. Dan mengakibatkan kesejahteraan petani pemilik lahan yang luas.

Senada dengan penuturan bapak junari dia mengatakan;¹⁵

“...Sangat penting sekali untuk membantu perekonomian petani, karena kalau tidak ada kepemilikan lahan kopi di hutan dapat dipastikan masyarakat banyak merantau dan banyak pengangguran serta banyak masyarakat miskin didesa ini”.

Pandangan dari bapak Nuraji dan Junari tersebut disangkal oleh bapak Abu yang menceritakan kesulitan ekonomi masyarakat pada waktu itu, sebagaimana yang diungkapkan dalam petikan wawancara sebagai berikut.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan bapak Junari 2015

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Abu 2015

Hafidz

“...Peristiwa ini terjadi sekitar 1998 sejak krisis moneter melanda negeri kita, warga kesulitan masalah ekonomi, masyarakat tidak stabil keadaannya sehingga masyarakat banyak yang merantau juga banyak yang alih profesi menjadi pencuri. Sehingga pada saat itu kondisi masyarakat sangat memprihatinkan, illegal logging di hutan itu sering terjadi kalau seandainya dibiarkan sampai sekarang mungkin hutan itu sudah habis. Untungnya pada saat itu ada beberapa wargayang sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuka lahan di hutan sehingga masyarakat itu lebih tenang, tentram dan aman. Banyak hal yang bermanfaat dengan dibukanya lahan di hutan diantaranya illegal logging sudah tidak ada lagi, hutan sudah hijau kembali masyarakat bisa berdaya dan mandiri. Pembukaan lahan itu bukan serta merta tapi karena memang sudah ada kesepakatan dengan perhutani membuka lahan, dengan syarat hutan tetap terjaga kelestariannya.”

Krisis ekonomi membuat masyarakat tercekik, perekonomian masyarakat tidak stabil, banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap keadaan perekonomian mereka, sehingga desakan-desakan bermuara pada hal-hal negative yang melanggar hukum. Setelah hutan menjadi lahan hijau dan produktif masyarakat seakan mendapatkan angin surga, perekonomian masyarakat bangkit dan kesejahteraan begitu terasa di Desa Kramat Sukoharjo yang berada disebelah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Keinginan masyarakat begitu tinggi terhadap penguasaan lahan di hutan dari beberapa narasumber yang ditemui oleh peneliti, P.Sabar utomo contohnya, dia menuturkan;¹⁷

”sangat ingin sekali bahkan kalau mau diurus ayo saya siap diurus kemana aja, seandainya bisa dimiliki secara pribadi dan saya siap tiap tahun bayar pajak”¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi warga sudah melekat pada penghasilan hasil panen kopi. Senada dengan itu, P. Abu juga mengungkapkan hal sama sebagai berikut;¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sabar Utomo 2015

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abu 2015

“...Sangat ingin sekali lahan hutan bagi kami, karena dengan lahan di-hutan kami bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan. Dengan keberadaan hutan kami tebanu secara ekonomi, mengurangi pengangguran sampai bisa mengurangi tingkat pencurian. Masyarakat hidup harmonis saling membantu satu sama lain, ikatan kekeluargaan semakin erat karena kami setiap bulan mengadakan pertemuan meski tidak rutin yang membuat kami merasa saling memiliki”.

Berbeda dengan yang lain P. Sudarto memberikan keterangan lain ketika peneliti bertanya tentang keinginannya untuk memiliki lahan hutan secara pribadi, dia mengungkapkan sebagai berikut;¹⁹

“...Tidak ingin, karena takut merusak fungsi hutan itu sendiri. Karena kalau sudah jadi hak milik masyarakat maka kecenderungan masyarakat menjaga fungsi hutan akan berkurang, sehingga akan rawan terjadi longsor dan dapat mengurangi daya serapan air. Dampaknya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Alasan tersebut sangat relevan jika dihadapkan pada kondisi masyarakat kita yang begitu homogen, bagi yang peduli mungkin akan tetap terawat, bagi yang tidak peduli akan merusak fungsi hutan sebagaimana yang diungkapkan narasumber diatas.

Karena hutan tetaplah hutan yang menjadi hajat hidup orang banyak, kebutuhan oksigen, menjaga habitat dan ekosistem yyang berada didalamnya serta sebagai serapan air yang mengalir disumber air, baik yang digunakan sebagai air sahran maupun yang mengalir disungai sebagai fungsi pengairan sawah dan lading serta masyarakat diderah hilir yang membutuhkan air untuk mencuci dan mandi. Karena masyarakat didaerah hilir sungai pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai tempat mencuci dan mandi, karena airnya masih jernih dan layak untuk digunakan untuk kebutuhan masyarakat banyak dalam berbagai hal.

Begitu banyak manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat banyak, maka perlu menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan kehidupan selanjut-

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sudarto 2015

Hafidz

nya baik buat ekosistem yang ada didalamnya maupun kebutuhan anak cucu kita kelak dikemudian hari.

Selanjutnya peneliti mencari informasi tentang; adakah transaksi jual beli lahan hutan?. Karena transaksi jual beli lahan hutan akan berdampak serius bagi kelangsungan kelestarian hutan itu sendiri. Dari beberapa narasumber yang ditemui peneliti didapatkan informasi yang sama. Salah satunya menurut Bapak Marliyan selaku anggota LMDH Kramat Jaya dia menuturkan;²⁰

“...Tidak ada transaksi jual beli lahan dikalangan kami dan pemilik lainnya. Yang ada hanya ganti rugi lahan dan biaya perawatan yang kemudian digantikan kepada orang lain yang mengganti biaya perawatan dan lainnya.”

Begitu sadarnya masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Sehingga perlu diangkat keperluan dan layak sebagai sumber atau referensi tentang kelestarian hutan. Apa yang dilakukan masyarakat daerah hutan adalah tindakan yang tepat, disamping ada payung hukum yang melindungi melalui SKB 4 Menteri serta tepat gunanya penggunaan lahan hutan menjadi lahan hijau dan produktif.

Dari pola kepemilikan lahan, masyarakat tidak pernah terjadi konflik baik batas wilayah kepemilikan dan pencurian lahan yang lain, karena mereka saling menjaga. Selaras dengan apa yang disampaikan P. Sudarto, dia menuturkan;²¹

“...Petani hanya memberi batas pagar tanaman dengan lahan milik warga lainnya, dan itupun tidak pernah ada permasalahan sedikitpun baik perebutan batas dan yang lainnya, karena warga saling menjaga dan gotong royong guna terjadi kerukunan bersama dan dalam kelompok LMDH Suko makmur kami memberikan fasilitas kartu identitas kepemilikan serta akte notaris untuk payung hukum kelompok kami”.

Apa yang disampaikan pak sudarto merupakan contoh begitu eratnya hubungan kekeluargaan antar pemilik lahan, meski dulu pernah ada gejolak yang ditimbulkan segelintir kepentingan sesaat. Namun saat ini gejolak itu

²⁰ Wawancara dengan Bapak Marliyan 2015

²¹ Wawancara dengan Bapak Sudarto 2015

tidak tampak lagi karena rasa saling memiliki dan menjaga kerukunan antar anggota.

Dari berbagai gesekan-gesekan sosial tempo dulu yang ditanggung beberapa oknum perhutani, membuat para pemilik lahan di hutan enggan mengadakan kerjasama dengan perhutani, hal ini peneliti dapatkan dari seluruhan warga yang dijadikan sample, sepuluh sample mengatakan hal yang sama, tentang kekecewaan mereka terhadap oknum Perhutani. Sehingga hampir seluruh masyarakat enggan bekerjasama dengan Perhutani, berikut penuturan Pak Sumarto sebagai tokoh dikalangan pemilik hutan;²²

“...Tidak ada bentuk kerjasama apapun, karena setiap akan ada kerjasama antara kelompok ini dengan perhutani selalu berbuntut kerugian yang akan di alami petani, sehingga kelompok dan petani menolak kerja sama tersebut. Ada beberapa petani yang tidak masuk dalam kelompok ini menjadi bukti bahwa perhutani tidak memihak pada petani karena perhutani memerintahkan pada petani untuk menanam pinus tetapi pada akhirnya kopi yang menjadi penghasil utama menjadi tidak produktif dan hasil dari pohon pinus tersebut dinikmati oleh oknum oknum perhutani, hal ini yang menjadi alasan kelompok LMDH Suko Makmur tidak bekerja sama dengan perhutani”.

Oleh karenanya sampai sekarang tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun dengan perhutani, bahkan sekarang jarang sekali pihak perhutani naik untuk sekedar mengontrol kondisi hutan.

Banyak hal yang perlu diketahui dipermukaan, mungkin dengan jalan penelitian ini bisa diungkapkan begitu berharganya hutan bagi masyarakat lereng barat pegunungan argopuro, serta begitu sadarnya masyarakat untuk merawat dan melestarikan hutan demi kelangsungan ekosistem didalamnya dan kelangsungan hajat orang banyak.

Hutan sebagai paru-paru dunia, penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat secara umum. Disamping itu hutan sebagai penahan erosi air hujan serta penjaga lereng agar tidak terjadi longsor yang berakibat banjir bandang bagi masyarakat sekitar hutan.

Hutan yang bukan hanya berfungsi sebagai cagar alam dan kelestarian

²² Wawancara dengan Bapak Sumarto 2015

Hafidz

hidup ekosistem, ternyata mampu menjadi penopang ekonomi, tempat mengais rezeki serta tempat penghasil rupiah bagi masyarakat yang dulu terpuruk secara financial kini menjadi masyarakat yang sejahtera serta berharap mampu melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni guna kelestarian hutan selanjutnya

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga system kehidupan. Berbagai manfaat besar diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedis sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbo, pemasok oksigen di udara penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global. Dalam pengelolaan hutan, sudah saatnya didorong untuk memper timbangkan manfaat, fungsi dan untung-rugi apabila akan dilakukan kegiatan eksploitasi hutan. Beberapa banyak nilai dari fungsi yang hilang akibat kegiatan penebangan hutan pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis seperti pada kawasan hutan di daerah hulu DAS, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan tersebut dapat di jadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan hutan di Indonesia

PENUTUP

Bahwa perambahan hutan berantara di Lereng Barat Pegunungan Argopuro oleh sebagian besar masyarakat Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, adalah kegiatan yang tidak melawan hukum karena sudah diatur dalam SKB 4 menteri dan justru membantu Pemerintah dalam hal perawatan hutan, penghijauan serta pelestarian hutan lindung milik Pemerintah. Kegiatan perambahan hutan belantara yang awalnya rusak akibat karena bencana maupun rusak karena ulah tangan manusia lainnya yang tidak bertanggung jawab adalah merupakan kegiatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Penanaman tanaman tertentu oleh masyarakat, seperti; kopi, durian, manggis dan pohon tegakan tinggi lainnya, dilahan yang dirambah merupakan hak priogratif masyarakat, terutama tanaman yang mampu menahan erosi/ atau tergerusnya tanah akibat air hujan dan menjadi penahan longsor. Tujuannya hutan agar

tetap lestari, ekosistem didalamnya tidak punah dan hutan sebagai sumber serapan air, serta terciptanya hutan sebagai fungsi paru-paru dunia.

Memang pada awalnya, perambahan hutan berujung pada illegal logging yang dilakukan oleh orang tua masyarakat lereng argopuro, guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, akan tetapi akibatnya anak cucu dari pelaku illegal logging mendapat ancaman berupa; hutan yang mulai gundul, mata pencaharian masyarakat berkurang karena ekosistem didalamnya sudah mulai rusak, ancaman longsor dan banjir bandang menghantui anak cucu mereka yang hidup setelah mereka. Kebiasaan buruk illegal logging orang tua masyarakat lereng argopuro ternyata tidak diturunkan kepada anak cucunya, sehingga kepedulian untuk penghijauan muncul pada saat sekitar tahun 1998/1999. Yang hal tersebut bersamaan dengan kondisi ekonomi Negara kita terpuruk akibat krisis ekonomi. Kegiatan perambahan hutan selanjutnya adalah kegiatan perambahan hutan belantara, semak-belukar dihijaukan dengan tanaman bernilai ekonomis yang tinggi yaitu: kopi, manggis, petai, durian dan tanaman tegakan tinggi lainnya. Disamping sebagai proyek penghijauan besar-besaran secara swadaya untuk melestarikan hutan sebagai mestinya, kegiatan ini menjadi lahan perubahan perekonomian masyarakat secara signifikan.

Gesekan-gesekan akibat kesenjangan ekonomi di masyarakat daerah sekitar hutan kini sudah redam, karena kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi dari hasil panen tanaman kopi dari hutan yang telah dirambah sebelumnya. Konflik internal antar pemilik lahan di hutan nyaris tidak ada, karena rasa saling memiliki yang cukup tinggi antar pemilik lahan, sedang konflik eksternal dengan pihak terkait seperti dengan perhutani sengaja dihindari agar masyarakat tidak selalu dihantui oleh rasa takut dan was-was, serta akibat pungutan liar dari beberapa oknum perhutani yang sengaja ingin memperkaya dirinya sendiri.

Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dari pihak terkait atau dinas terkait belum menyentuh masyarakat secara luas, terutama pada masyarakat Desa kramat Sukoharjo yang hidup di lereng barat pegunungan argopuro. Sehingga masyarakat hanya bermodalkan pengetahuan seadanya dalam merawat serta melestarikan hutan lindung. Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penting menjaga kelestarian alam perlu

Hafidz

digalakkan oleh dinas terkait agar masyarakat berduyun-duyun menjaga lingkungan sekitar mereka terutama yang bersetuhan langsung kegiatan perambahan hutan menjadi hutan produktif. Karena sejak awal kurangnya sosialisasi dan penyuluhan ini berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup selanjutnya, sehingga masyarakat terdahulu yang minim informasi merambah hutan dengan membabi-huta dengan menjarah kayu hutan/illegal logging hanya untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Berbeda dengan anak cucunya sekarang, kesadaran mereka terbuka meski tanpa ada penyuluhan sebelumnya, mereka merambah hutan gundul dan menjadi semak-semak, dengan menanami tanaman yang produktif bernilai ekonomi yang tinggi. Sehingga mampu menjadi penopang ekonomi keluarga tanpa ada batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A., 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri : Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. BIGRAF-Ford Foundation, Yogyakarta.
- Barber, Charles Viktor dkk, 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barton, Greg, 2005, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS.
- Capra, F., 2001. *"Jaring-jaring Kehidupan" Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*.
- Kaban, Ms, 2009, *Hutan Bagi Masa Depan Indonesia*. Harian Seputar Indonca.
- Kartodirdjo, Sartono, 1973, *Protest Movement in Rural Java; a Study of Agrarian Unrest in The Nineteenth and Early Twentieth*, Singapura: Sinturis.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984, *Agrarian Radicalism in Java*, Singapura: Sinturis
- Kasdi, Aminudin, 1990, *Masalah Tanah dan Kekerasan Petani di Jawa Timur*, sebuah tesis, tidak diterbitkan.
- Kuntowijoyo, 2002, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta : Bentang.
- Larson, 2013, *Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan*, Bogor: CIFOR
- Padmo, Sugianto, tth, *Land Reform dan Gerakan Protes Petani Klaten*, Yogyakarta: Laporan studi P3PK UGM.
- Pratikno, Fajar, 2000, *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Media Presindo
- Ricklefs, M.C., 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : UGM Press.
- Santoso, H. dkk., 2015. *Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kemitraan. Partnership for Governance Reform in Indonesia*.
- Setia zain,alam, 1995. *Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simon, Hasanu, 2004. *Membangun kembali hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, Hasanuh, 2003, *Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hafidz

- Sunderlin, W., 2008, *From Exclusion to Ownership; Challenge and Opportunities In Advancing Forest Tenure Reform*, Washington DC: Right and Resource Initiative.
- Tarigan, Robert Valentino, 2006. *Adakah Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Lingkungan. Suara Rimba*.
- The Nature Conservancy., 2014. *How the Wehea People Protect and Secure Their Rights to Communal Lands, Territories and Natural Resources*.